

**IMPLEMENTASI PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT  
IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH  
PEMBUATAN AKTA PERHARI  
DI KOTA GORONTALO**

Oleh:

Nur Jannah Mokoginta<sup>1</sup>, Harry Purwanto<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari di Kota Gorontalo dan mengetahui penegakan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut di Kota Gorontalo. Hal ini menarik untuk dikaji karena peraturan ini merupakan peraturan baru yang masih banyak menuai pro dan kontra di tengah kalangan Notaris, sehingga dalam pelaksanaannya masih belum bisa diimplementasikan secara efektif di Kota Gorontalo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Cara pengumpulan data menggunakan data primer (penelitian lapangan) yang tetap berbasis pada data sekunder (penelitian kepustakaan). Data primer akan diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan responden dan narasumber, dengan menggunakan pedoman wawancara bebas terpimpin. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari di Kota Gorontalo belum dapat diimplementasikan secara efektif, karena kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan. Terkait penegakan pelaksanaan peraturan tersebut, pengawasannya tidak dilakukan secara langsung oleh Dewan Kehormatan Wilayah tetapi disini Dewan Kehormatan Wilayah berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah. Namun sampai saat ini belum pernah ada dilakukan pemeriksaan maupun pemberian sanksi yang tegas kepada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran peraturan tersebut.

Kata kunci: Notaris, Dewan Kehormatan, Peraturan DKP INI No.1/2017, Pengawasan Notaris, Kode Etik Notaris

---

<sup>1</sup> Jalan Sawah Besar, Kelurahan Heledulaa Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**THE IMPLEMENTATION OF CENTRAL HONOR BOARD OF  
INDONESIAN NOTARY ASSOCIATION NUMBER 1 OF  
2017 ON FAIRNESS LIMIT OF DAILY DEEDS  
PROCESS IN GORONTALO CITY**

By:

Nur Jannah Mokoginta<sup>3</sup>, Harry Purwanto<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

This research was aimed to know the implementation of Honor Board Regulations of Indonesian Notary Association Number 1 of 2017 on Fairness Limit of Daily Deed Process in Gorontalo City and to know the enforcement towards the implementation of that regulation in Gorontalo City. This was interested to be examined due to this regulations are the new ones in which still pros and contras amidst Notary members so that in the implementation it have not implemented effectively in Gorontalo City.

This was a juridical empirical law with its descriptive nature. Data gathering technique used a primary data (field research) that keep based on a secondary data (literature research). Primary data would be acquired by a direct interview with respondents and informants using a guided free interview manual. Data acquired would be analyzed by a qualitative approach method.

The research results declared that Regulations of Central Honor Board of Indonesian Notary Association Number 1 of 2017 on Fairness Limit of Daily Deed Process in Gorontalo City had not been implemented effectively due to less equal of socialization conducted. Related to the enforcement of regulation implementation, the supervision was not conducted directly by Regional Honor Board, but Regional Honor Board here coordinated with Regional Supervisor Assembly. However, until today there had never been conducted investigation as well as gave sanction strictly to the Notary who is suspected to violate the regulations.

**Keywords:** Notary, Honor Board, Regulations of DKP INI No.1/2017, Notary Supervision, Notary Ethics Codes

---

<sup>3</sup> Sawah Besar Street, North Heledulaa Village Head, Gorontalo City, Province of Gorontalo

<sup>4</sup> Lecturer of Faculty of Law Gadjah Mada University Yogyakarta